

P-ISSN: 3047-352, E-ISSN: 3047-7018

JURAMA, Vol. 2, No. 4, Nopember-Desember 2025 (1057-1065)

©2024 Lembaga Aspirasi Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian Putra Bangsa (LP4B) Tangerang Selatan



ANALISIS KEPEMILIKAN KELUARGA, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PERUSAHAAN *ENERGY* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022

Ajeng Sulistyaning Tiyas^{1*}, Siarwi²,¹Ekonomi Bisnis, Universitas Pamulang ; ajengsulistyaningtiyas23@gmail.com*²Ekonomi Bisnis, Universitas Pamulang ; dosen01752@unpam.ac.id *

Abstract

The research aims to find out the impact of family ownership, executive compensation, and political connections on tax avoidance. The research was carried out on energy companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018-2022. The total sample used in this study was 16 companies with a total of 80 observations. The sample determination method of this study uses quantitative methods with purposive sampling techniques. Data analysis techniques are performed using double linear regression analysis techniques. The results of this study show executive compensation have a positive and significant impact on tax avoidance. The research also found that family ownership and political connections have no significant influence on tax avoidance.

Keywords: Family Ownership, Executive Compensation, Political Connections, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan dengan jumlah observasi 80. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Keluarga, Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, *Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban finansial yang dikenakan secara wajib oleh pemerintah kepada individu dan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pajak yaitu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pajak menjadi sumber penghasilan utama bagi negara, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang esensial bagi kemakmuran rakyat. Di Indonesia, sistem perpajakan didesain untuk tidak hanya

mengumpulkan dana, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Penerimaan pajak secara signifikan dipergunakan guna mengurangi jumlah utang yang akan dikeluarkan suatu negara didalam proyek pembangunan, termasuk utang dari pemerintah (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 1.231,87 triliun atau 100,19% tumbuh 16% dari target yang di anggarkan yaitu sebesar Rp 1.229,9 triliun. Di APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun naik 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, Pajak Penghasilan (PPH)



ditargetkan Rp638 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan Rp518,5 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 (Kemenkeu, 2022). Selain itu, dalam industri batu bara juga memiliki sumbangsih terhadap penerimaan negara. Tercatat penerimaan negara tahun 2021 yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) mencapai angka Rp 124,4 triliun (Ditjen Mineral dan Batu Bara, 2022). Dan pada September 2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara dalam sektor ini mencapai Rp 130 triliun. Nilai tersebut mencakup bea keluar, pajak, hingga Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Namun Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak sejak awal Januari hingga akhir Agustus 2021 mencapai Rp 741,3 triliun. Capaian itu masih di bawah realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun 2019, ketika belum terjadi pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 920,15 triliun. Banyak pihak menilai bahwa kinerja perpajakan tahun ini belum akan optimal seiring pengetatan kegiatan masyarakat di tengah lonjakan kasus Covid-19, setidaknya pada setengah tahun pertama kinerja perpajakan belum optimal di tengah perekonomian yang belum pulih. Sacha Winzenrie (2021) *Mining Advisor* dari PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal ini terungkap dalam publikasi terbaru PwC yang berjudul *Mine 2021 Great Expectation*.

Perusahaan pertambangan besar tidak mematuhi ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lain yang diterapkan pemerintah. Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan *energy* didukung dengan terungkapnya kasus pada tahun 2019 yaitu perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International Pte Ltd*. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberikan penghasilan yang jauh lebih tinggi kepada pemegang saham perusahaan (Edi

Suwiknyo, 2021). Tahun 2021 Dokumen Pandora Papers yang diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). ICIJ menerima bocoran data finansial rahasia 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak seperti *British Virgin Islands* dan Republik Panama. Dokumen itu mengungkap 11,9 juta rekam data yang berisikan kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Perusahaan cangkang tersebut diantaranya dimiliki nama-nama bekas presiden, politikus, dan pengusaha besar dari berbagai negara. Sebelumnya, ICIJ telah berhasil mengungkap dokumen Panama dan *Paradise Papers*.

Polemik *Panama* hingga *Pandora Papers* memperlihatkan bahwasanya cacat hukum Indonesia bisa dipergunakan melaksanakan kecurangan. Seperi kelemahan pada Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat atau *Beneficial Owner/BO* dimana Perpres mengharuskan pemilik manfaat untuk melaporkan kepada pemerintah. Namun, Peraturan Presiden tersebut tidak berhasil menjangkau perusahaan yang didirikan di luar negeri oleh warga Indonesia. Tidak diragukan lagi betapa pentingnya menyebarkan informasi mengenai pemilik manfaat serta pemilik perusahaan kepada masyarakat umum (*Indonesia Corruption Watch, 2021*). *Tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dianggap salah satu trik dalam menghindari pelunasan pajak secara resmi yang diterapkan oleh Wajib Pajak dengan cara mengecilkan besaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelesuan atau rancunya peraturan (Umar 2022).

Faktor yang mempengaruhi pengambilan Tindakan *tax avoidance* diantaranya adalah kepemilikan keluarga dalam perusahaan. Dimana di Indonesia sendiri jumlah perusahaan keluarga mencapai 95% (Sembilan puluh lima persen) seperti yang dikemukakan oleh Apung Sumengkar (2018) "*Managing Partner* (CEO) Daya Qarsa, menunjukkan bahwa bahwa 95 persen bisnis di Indonesia masih dikategorikan sebagai bisnis keluarga". Perusahaan di Indonesia rata-rata

dikuasai oleh keluarga. Perusahaan yang dikuasai oleh keluarga mempunyai peluang yang baik untuk menghindari pajak dan mengalihkan uang mereka ke properti pribadi (Kusnadi, 2022).

Selain itu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penghindaran pajak ialah kompensasi eksekutif. Karena eksekutif hanya harus bekerja untuk satu perusahaan, kompensasi eksekutif adalah sarana yang diberikan kepada mereka dan jajaran pengambil keputusan sebagai penghargaan atas upaya mereka dan sebagai kompensasi yang seimbang atas peluang yang hilang (Soesila, 2021). (Banghoj, et. al, 2010) dalam (Kenny Ardillah 2021) menyatakan kompensasi eksekutif adalah upaya untuk mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Sebagian besar orang menganggap kompensasi eksekutif sebagai cara untuk mengatur kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Penghindaran pajak perusahaan. Kebijakan perusahaan menentukan keputusan penghindaran. Direktur dan konsultan pajak perusahaan adalah anggota eksekutif perusahaan yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan pajak. Keputusan mereka memengaruhi dan membentuk kebijakan, termasuk keputusan tentang penghindaran pajak. Dalam kapasitas mereka untuk membuat keputusan, eksekutif memiliki atribut yang mempengaruhinya.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu koneksi politik. Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi penghindaran pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia secara umum memiliki koneksi politik (Pranoto & Widagdo, 2019). Sejumlah komisaris BUMN yang memiliki koneksi dengan pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 -2014. Koneksi politik juga tampak jelas pada awal masa pemerintahan presiden Joko Widodo, dimana saat itu mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Selain itu pada Juli 2023 presiden Jokowi juga melantik Budi Arie yang merupakan DPP Projo atau relawan Pro-Jokowi sejak 2014 lalu sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia (Pranoto dan Widagdo, 2016) dalam (Wedhar, 2018).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data yang di ambil pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) serta website masing-masing perusahaan, yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Paranormal mengacu pada seluruh kelompok orang, kata, kurik atau hal yang peneliti penelitiktensil oleh (Aulia, 2019) Didik seluruh penelitian ini, populasi yang yang adalah pertambahan batubara perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode. Pemilu pertok perkain batubara dari populasi populasi pada pada pada pada underlyingrenyandang nilai tambah ini merupakan strategi qaster nasional dan dan dan karakteristik industri yang berkaitan struktur kandang silas kilogram, pengampelasan, pengampsyikman ahli abilik para polisi para stead. Adakas sampel bagian dari populasi yang secara kegemendia dan dipilih untuk menjadi tokoh sistematis karakteritas ekosistem, makmal pembelajaran penelitian dapat diberikan oleh yang representasi yang representasiatif yang yang fenomena.

Pengambilan menggunakan sampel sampel sampling, teknik yang yang menggunakan sampel termasuk faktorkanfaktor faktor yang merupakan yang merupakan penelitian yang relevan. Teknik Teknik Penarikas sampel metode pengambilan sampel yang dapat dilakukan disimpan ayat ini adalah cara cara sampel sampel dari pilih paramodo peta) informasi yang yang tersedia. Dalam hal ini, kriteriaPU, yang Terdapat didikan perusahaan yang secara lengkap informasi yang memiliki status, statusis keluarga, eksekutif, dan koneksi

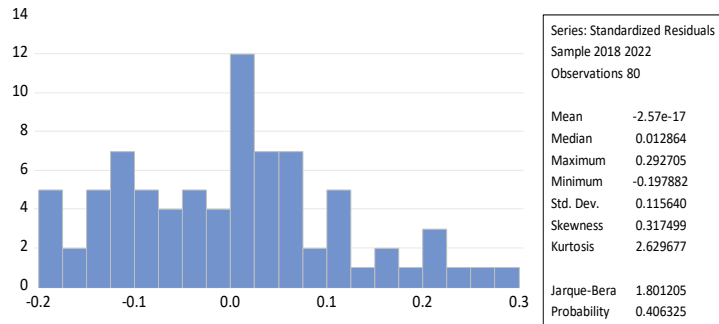
politik yang dapat keuangan yang diidentifikasi melalui laporan dan laporan data. Ini kriteria, mendaniskan secara berpatyaitan yang meliputi perusahaan yang meliputi firma yang meliputi firma yang organisasi keuangan yang periodidot selama rawit, data yang terkait lengkap variabel-variabel yang, sindrom dan penghapusan dan penghapusan pencatatan (delisting) dari Bursa Efek Indonesia

Indonesia. Sampel dipilih dari perusahaan perusahaan-perusahaan-yang yang karakteristik peralatan proestas penelitian, data yang dapat dapat yang diperoleh diolah dan ditugasi dianalisis pemanuan faktoruan anjingosit para hipotetidik secara teori fisika fisika dan akurat sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik



Sumber : Output E-Views Student Version Lite 12, 2024

Gambar 4. 1

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,801205 dan nilai probability 0,406325 lebih besar dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (lolos normalitas).

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 9

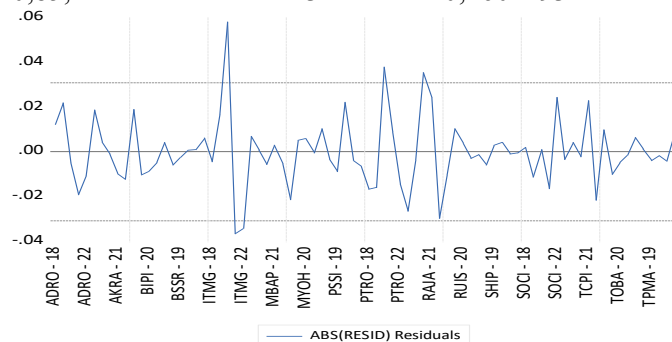
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2LN	X3
X1	1.000000	-0.010998	-0.133832
X2LN	-0.010998	1.000000	-0.160193
X3	-0.133832	-0.160193	1.000000

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji multikolinearitas memiliki Koefisien korelasi X1 dan X2LN sebesar -0,010998 kurang dari 0,85, dan X3 sebesar -0,133832 kurang dari 0,85, dan X2LN dan X3 sebesar -0,1601193

kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas (Napitulu et al., 2021 : 141).

Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedasias atau lolos

uji heteroskeddasitas (Napitulu et al., 2021 :143).

Uji Autokorelasi

R-squared	0.789191	Mean dependent var	0.219566
Adjusted R-squared	0.726985	S.D. dependent var	0.110874
S.E. of regression	0.057932	Akaike info criterion	-2.655231
Sum squared resid	0.204726	Schwarz criterion	-2.089499
Log likelihood	125.2092	Hannan-Quinn criter.	-2.428413
F-statistic	12.68673	Durbin-Watson stat	2.366493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output E-Views Student Version Lite 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 didapatkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2,366493 nilai tersebut berada diantara 1,5 sampai 2,5 jadi dapat dikatakan bahwa model pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

R-squared	0.789191	Mean dependent var	0.219566
Adjusted R-squared	0.726985	S.D. dependent var	0.110874
S.E. of regression	0.057932	Akaike info criterion	-2.655231
Sum squared resid	0.204726	Schwarz criterion	-2.089499
Log likelihood	125.2092	Hannan-Quinn criter.	-2.428413
F-statistic	12.68673	Durbin-Watson stat	2.366493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output E-Views Student Version Lite 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji signifikan simultan (uji f) didapatkan nilai F hitung sebesar 12,68673 > F tabel yaitu 2,718784 dan nilai sig 0,000000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel X1

(Kepemilikan Keluarga), X2LN (Kompensasi Eksekutif), dan X3 (Koneksi Politik) berpengaruh signifikan terhadap Y (*Tax Avoidance*) pada perusahaan jenis *Energy* di Indonesia.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/29/24 Time: 21:42
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.808142	0.546661	3.307609	0.0016
X1	-0.014693	0.083084	-0.176843	0.8602
X2LN	-0.068774	0.023124	-2.974120	0.0042
X3	0.034402	0.046096	0.746311	0.4583

Sumber : Output E-Views Student Version Lite 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji signifikan parameter individual (uji t) Pengaruh Variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji t pada variabel X1 (Kepemilikan Keluarga) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,176843 < t tabel yaitu 1,990847 dan nilai sig 0,8602 > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel X1 (Kepemilikan Keluarga) tidak

berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

2. Hasil uji t pada variabel X2LN (Kompensasi Eksekutif) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,974120 > t tabel yaitu 1,990847 dan nilai sig 0,0042 < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya variabel X2LN (Kompensasi Eksekutif) berpengaruh positif dan signifikan



terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

- Hasil uji t pada variabel X3 (Koneksi Politik) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,746311 < t tabel yaitu 1,990847 dan

nilai sig 0,4583, maka H0 diterima dan H3 ditolak. Artinya variabel X3 (Koneksi Politik) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.789191	Mean dependent var	0.219566
Adjusted R-squared	0.726985	S.D. dependent var	0.110874
S.E. of regression	0.057932	Akaike info criterion	-2.655231
Sum squared resid	0.204726	Schwarz criterion	-2.089499
Log likelihood	125.2092	Hannan-Quinn criter.	-2.428413
F-statistic	12.68673	Durbin-Watson stat	2.366493
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output E-Views Student Version Lite 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji koefisien determinasi (R²) diketahui bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,726985 atau 72,69%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari X1 (Kepemilikan Keluarga), X2LN (Kompensasi Eksekutif), dan X3 (Koneksi Politik) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Y (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan jenis *energy* di Indonesia sebesar 72,69%, sedangkan sisanya yaitu 27,30% (100 – Nilai *Adjusted R Square*) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kompensasi Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji f) didapatkan nilai F hitung sebesar 12,68673 > F tabel yaitu 2,718784 dan nilai sig 0,000000, dengan uji menggunakan *Fixed Effect Model*, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen yaitu X1 (Kepemilikan Keluarga), X2LN (Kompensasi Eksekutif), dan X3 (Koneksi Politik) berpengaruh bersama-sama (simultan) terhadap Y (*Tax Avoidance*) pada perusahaan jenis *Energy* di Indonesia.

Berdasarkan nilai *adjust R-squared* pada uji simultan koefisien determinasi (R²) didapat nilai sebesar 0,726985 atau 72,69%. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya Kepemilikan Keluarga, Kompensasi Eksekutif, dan Koneksi Politik memiliki pengaruh sebesar 72,69% terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan variabel lainnya yang tidak diperhitungkan

oleh kajian ini memengaruhi sebesar 27,30%.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil Hasil uji t pada variabel X1 (Kepemilikan Keluarga) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,176843 < t tabel yaitu 1,990847 dan nilai sig 0,8602 > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel X1 (Kepemilikan Keluarga) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada variabel X2LN (Kompensasi Eksekutif) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,974120 > t tabel yaitu 1,990847 dan nilai sig 0,0042 < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya variabel X2LN (Kompensasi Eksekutif) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada variabel X3 (Koneksi Politik) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,746311 < t tabel yaitu 1,990847 dan nilai sig 0,4583, maka H0 diterima dan H3 ditolak. Artinya variabel X3 (Koneksi Politik) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Energy* di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Analisis Kepemilikan Keluarga, Kompensasi Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-



2022 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya Kompensasi Eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. Artinya Koneksi Politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jenis *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018) (dalam bahasa Inggris). Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Dan Capital Intensitas Pada Penghindaran Pajak Pada. E-Jurnal Akuntansi, 25(2), 1481-1505.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p25>
- Asmilia, N., & Hanah, S. (2022). Intensitas Modal Dan Konservatisme Pecat Penghindaran Pajak Pajak Penghindaran Penginju Dewan Dewan Independensi Beragam Dengan Moderasi. IJMA (Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Indonesia), 3(2), 143-149.
<https://doi.org/10.59857/ijma.v3i2.363>
- Aulia, H., Dan Indriasih, D. (2019). Pengembalian Aset, Tata Kelola Perusahaan Dan Karakter Penghindaran Pajak Eksekutif (Pada Sektor Pertambangan Yang Ter Di Bursa Efek Tahun Indonesia 2013-2017). Permana: Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 11(1), 52-62.
<https://doi.org/10.24905/permana.v11i1.79>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Apakah Perusahaan Keluarga Lebih Agresif Pajak Daripada Perusahaan Non-Keluarga? Jurnal Ekonomi Keuangan, 95(1), 41-61.
<http://doi.org/10.1016/j.fineco.2009.02.003>
- Darmawan, aku. G. H., Dan Sukartha, Aku. M. (2014). Pemerintahan Perusahaan Penerapan, Leverage, Return On Aset, Dan Perusahaan Pada Syarat Dirjenjalkan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9 (1), 143-161.
- Dewi, N. N. K., Dan Jati, Aku. K. (2014). KarakterKarlik, Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Pada Pemelengkap Pajak Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249-260.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). Sebuah review dari penelitian pajak. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 50(2-3), 127-178.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Herawati, N., Rahmawati, Bandi, B., & Setiawan, D. (2021, September07). Kepemilikan Keluarga Dan Agresivitas Pajak Perusahaan: Efek Moderasi Komisariss Independen. Jurnal Tata Kelola Dan Regulasi, 10 (4), 1-09.
<https://doi.org/10.22495/jgrv10i4art1>
- Jihene, F., Dan Moez, D. (2019). Efek Moderat Kualitas Audit Pada Kompensasi CEO Dan Penghindaran Pajak: Bukti Dari Konteks Tunisia. Jurnal Internasional Ekonomi Dan Masalah Keuangan, 9 (1), 131-137.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Khurana, Aku. K., & Moser, W. J. (2013). Horizons Investasi Pemegang Saham Institusional dan Penghindaran Pajak. Journal of American Taxation Association, 35(1), 111-134.
<https://doi.org/10.2308/atax-50315>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keluarga: Bukti Dari Perusahaan Swasta Besar. Jurnal Akuntansi & Ekonomi Kontemporer, 15(2), 145-157.

- <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). Pengaruh Dewan Direksi Komposisi atas Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 30(1), 50-70.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Tata Kelola Perusahaan, Laba Dan Karakterabilitas Pada Eksekutif Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2), 525-539.
- Minnick, K., Dan Noga, T. (2010). Apakah Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Mempengaruhi Manajemen Pajak? *Jurnal Keuangan Perusahaan*, 16(5), 703-718.
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Prastiwi, D., Dan Ratnasari, R. (2019). Pengaruh Kapitalisasi Tipis dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Internasional Penelitian dalam Bisnis dan Ilmu Sosial*, 8(6), 33-40.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i6.525>
- Putu, Niluh, D, R, H, N. (2022). "Kecuderkan Perusahaan Penghindaran Pajak: Berpengaruhkah Keuangan Keterbacaan Laporan Yang Rendah?". Dengan berita Unair. Diakses 6 Desember 2023.
<https://news.unair.ac.id/2022/01/81/kesingenderungan--melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruhkan-terhadap-ketercapadanakan--keuangan-yang-yang--2/atau%20lang%20id>
- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. (2013). Dampak dari Board of Director Oversight Karakteristik pada Agresivitas Pajak Perusahaan: Analisis Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 32(3), 68-88.
- <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Safitri, Ika. (2022). "Kenaikan: 70 Persen Perusahaan Keluarga Di Di Tiri Sampai BeriTU- Lagi Dapat Tahan Kedua. Kompas. Diakses 02 Juli 2023.
<https://money.kompas.com/read/2022/04/18/163000526/riset-70-persen-mengunci---di-ri-in-i-in-di-perilaku-tahan-generasi-?%20halaman%20semua>
- Sahara, L. Aku. (2022). Komisariss Independen, Audit Komite Kualitas, Audit Dan Capital Intensity Tax Avoidance Pengabling Karakter Eksekutif Sesuai Polari Moderasi Pada Nama Taman Dengan Perusahaan LQ 45 Ter Ter Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Refleksi: Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, 5(3), 507-515.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.563>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Koneksi Politik Politik, Intensitas Aset Harus Tetap, Independen, Keuntunganabilitas Dan Penghindaran Pajak Leverage. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30.
<https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3213>
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, dan Agresivitas Pajak. *Prosiding Konferensi Akuntansi Internasional ke-3 & Kolquium Doktor ke-2*, 179.
- Suminar, D., Dan Nadi, L. (2020). Penghindaran Pajak, Manajemen Pendapatan, Dan Kepemilikan Biaya Debisme Kerasikat. *Jurnal Ilmiah Wahana*, 15(2), 153-162.
<https://doi.org/10.21009/wahana.15.022>
- Syahputra, Eqqi. (2022). "Ini Industri Industri Batu Bara Ke Ekonomi & Daerah". *CNBC Indonesia*. Diakses 09 Desember 2023.
<https://www.cbciindonesia.com/market/20221004113736-17-377028/ini->

[peranindustri-batu-batu-bara-kasaran-ekonomi--kira](#)

Wang, Y., Dan Yao, J. (2021). Dampak Insentif Kompensasi Eksekutif Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Ekonomi Modern*, 12(12), 1817-1834. <https://doi.org/10.4236/me.2021.1212095>

Widyastuti, M. P. C. (2020). Kepepenginlik Para Keluarga Kepemilikan Dalam Institusional Inilabsikon Politik Yang Koneksi Politik Sebagai Pemoderasi Dengan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2). <https://doi.org/10.24843/JIMFEB.2020.v08.i02>